

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peristiwa politik terhadap *abnormal return* pada saham BUMN dan pada saham BUMS di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini terfokus pada peristiwa politik yaitu pengumuman *reshuffle* kabinet pada periode 2004, 2005, dan 2007.

Penelitian ini menggunakan periode penelitian selama 20 hari dimana untuk 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa politik dengan periode estimasi 100 hari. Pengamatan *abnormal return* disebabkan karena suatu pasar dapat dikatakan efisien secara informasi atau tidak tergantung dari *abnormal return* yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh perusahaan BUMN dan 10 perusahaan yang berkapitalisasi terbesar BUMS. Dalam penelitian ini pengukuran *expected return* dilakukan dengan model indeks tunggal atau *single index model*. Penelitian ini menggunakan 2 pengujian yaitu *one sample t-test* untuk melihat ada atau tidaknya *abnormal return* yang signifikan disekitar peristiwa dan *paired sample t-test* untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa *reshuffle* kabinet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada peristiwa *reshuffle* kabinet untuk saham BUMN pada periode 2004 terdapat *abnormal return* signifikan pada $t+1$ atau 1 hari sesudah peristiwa *reshuffle* kabinet. Pada periode *reshuffle* kabinet 2005 untuk saham BUMN juga menunjukkan terdapat *abnormal return* signifikan pada t dan $t+2$ atau pada hari kejadian dan 2 hari sesudah peristiwa. Pada periode *reshuffle* kabinet 2007 untuk saham BUMN juga terdapat *abnormal return* signifikan pada $t-7$ atau 7 hari sebelum peristiwa. Pada saham BUMS untuk *reshuffle* kabinet periode 2004 menunjukkan hasil terdapat *abnormal return* signifikan pada $t+1$ atau 1 hari sesudah peristiwa pengumuman *reshuffle* kabinet. Pada *reshuffle* kabinet 2005 untuk saham BUMS menunjukkan hasil tidak terdapat *abnormal return* signifikan. Pada pengumuman *reshuffle* kabinet 2007 untuk saham BUMS menunjukkan hasil tidak terdapat *abnormal return* signifikan.

Kata kunci : *Abnormal Return*, BUMN, BUMS, dan *Reshuffle* Kabinet

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of political events on abnormal return on the business state-owned company and private company in Indonesia Stock Exchange (BEI). This study focused on political reshuffle cabinet of on period 2004, 2005, and 2007.

This study uses the research period for 20 day which for 10 day before and 10 day after the date on political events with 100 days for the period of estimation. Observation of the abnormal return due to an efficient market can be sad of information or not depends on the abnormal return generated. All of the population is state-owned company and 10 biggest capitalization private company. In this research is done by measuring expected return with single index model. This study uses two test of one sample t-test to see whether there is any significant abnormal return around the event and paired sample t-test to see whether there is any difference in abnormal return before and after the political event.

The results of this study showed that the cabinet reshuffle events for state-owned shares in the period of 2004 there were significant abnormal return at $t +1$ or 1 day after the events of the cabinet reshuffle. In the period 2005 stock the cabinet reshuffle also showed there were significant abnormal return at t and $t +2$ or on the day of the incident and two days after the event. In the period 2007 to reshuffle the cabinet there are also state-owned shares significant abnormal return at $t-7$ or 7 days before the event. In stock private company for the period 2004 cabinet reshuffle results showed there were significant abnormal return at $t +1$ or 1 day after the cabinet reshuffle announcement event. In the cabinet reshuffle in 2005 for stock private company results showed no significant abnormal return. In 2007 cabinet reshuffle announcement to the stock private showed result there are no significant abnormal return.

Keyword : Abnormal Return, State-owned Company, Private Company, and Reshuffle Cabinet